

ANALISIS DAYA SAING USAHATANI JAGUNG PIPIL DI DESA RASAU JAYA I
COMPETITIVENESS ANALYSIS OF CORN FARMING IN RASAU JAYA I VILLAGE

Reynaldo Alka Pratama^{1*}, Novira Kusri², Maswadi³

^{1*} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura
ralkapratama@gmail.com

² Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura
maswadi@faperta.untan.ac.id novira_k@yahoo.co.id

³ Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura
maswadi@faperta.untan.ac.id

*Penulis korespondensi: novira_k@yahoo.co.id

ABSTRACT

Competitiveness enhancement of farming is an important aspect to attend the global trade, especially for corn commodity which is a commodity with various benefits that can be processed into animal food, industrial raw material and ethanol fuel. This research aims to analyze the competitiveness of corn farming and analyze the impact of government policies on farming. This research was conducted in Rasau Jaya I Village, Kubu Raya Regency which involved 56 respondents of corn farmers. The data obtained were processed using Policy Analysis Matrix method. The result of this research shows that the corn farming in Rasau Jaya I Village is competitive but the policies implemented by the government are still not able to protect the corn farmer so it is necessary to review policies so that the policies implemented by the government are able to protect the farming

Keywords: *Competitiveness, Policy Analysis Matrix, Farmings*

ABSTRAK

Peningkatan daya saing usahatani merupakan aspek yang penting dalam menghadapi perdagangan global, khususnya komoditas jagung pipil yang merupakan komoditas dengan berbagai macam manfaat yang dapat diolah menjadi pakan, bahan baku industri, dan bahan bakar etanol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing usahatani jagung dan menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani. Penelitian dilakukan di Desa Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya, yang melibatkan 56 orang responden petani jagung pipil. Data yang didapat diolah menggunakan metode Policy Analysis Matrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I memiliki daya saing namun kebijakan yang diterapkan pemerintah masih belum mampu untuk memproteksi usahatani jagung pipil sehingga perlunya pengkajian kebijakan agar kebijakan yang diterapkan pemerintah mampu memproteksi usahatani.

Kata kunci: *Daya Saing, Policy Analysis Matrix, Usahatani*

PENDAHULUAN

Peningkatan daya saing usahatani merupakan agenda penting dalam rangka pembangunan pertanian guna menghadapi perdagangan bebas serta pemenuhan pangan nasional yang berkualitas. Konsep daya saing dapat diukur melalui dua aspek, yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif berusaha untuk menjelaskan perbandingan keuntungan petani dibawah kondisi perubahan seperti distorsi pasar maupun kebijakan pemerintah yang berlaku (Haryanto et al., 2019). Jagung merupakan tanaman pangan potensial yang bermanfaat sebagai bahan baku industri pakan, konsumsi rumah tangga, dan bahan baku industri makanan yang kebutuhannya diproyeksikan akan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk (Lestari et al., 2020). Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan potensi peningkatan daya saing usahatani jagung pipil, dikarenakan Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi penghasil jagung pipil terbesar kedua di Pulau Kalimantan dengan Kabupaten Bengkayang sebagai produsen terbesar pertama dengan hasil produksi rata-rata 78.373 ton dan Kabupaten Kubu Raya dengan hasil produksi rata-rata 8.048 ton.

Wacana Peningkatan daya saing usahatani jagung merupakan isu penting di Kabupaten Kubu Raya untuk menjadi sentra produksi jagung di Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam program rencana pembangunan jangka panjang pemerintah Kabupaten Kubu Raya periode 2009-2029 yang dimana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berusaha untuk menciptakan ketahanan pangan daerah yang mendukung ketersediaan pangan nasional serta mampu bersaing di pasar dunia baik dari segi kualitas dan kuantitas serta tersedianya kawasan/arael pertanian, peternakan, dan perkebunan dalam jumlah yang cukup efektif dalam menjaga dan meningkatkan produksi yang berkualitas secara kontinyu. Partisipasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya terkait peningkatan daya saing usahatani khususnya jagung pipil dapat dilihat dengan diterbitkannya Perbup No. 44 Tahun 2015 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Kubu Raya dimana harga pupuk bersubsidi hanya diberikan kepada petani dan bukan kepada perusahaan pertanian. Desa Rasau Jaya I merupakan sentra produsen jagung di Kabupaten Kubu Raya kegiatan usahatani jagung yang dilakukan masyarakat setempat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun dilakukan secara komersil dengan corak kegiatan usahatani yang masih tradisional, kondisi tersebut berakibat pada pemanfaatan input yang kurang efisien sehingga dapat mempengaruhi kemampuan komoditas jagung daerah tersebut untuk dapat bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional (Susilawati et al., 2015).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Policy Analysis Matrix (PAM) guna mengukur daya saing usahatani di Desa Rasau Jaya I melalui indikator keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif serta mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani jagung pipil yang dijalankan (Radiansyah et al., 2016). Sehingga pemerintah Kabupaten Kubu Raya mampu mengetahui kondisi aktual usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I sebagai sentra produksi jagung di kabupaten tersebut dan mampu memberikan kebijakan yang protektif terhadap usahatani jagung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang merupakan daerah sentra produksi jagung di Kabupaten Kubu Raya. Pengambilan sampling responden dilakukan dengan metode *proporsional random sampling*. Menurut Sugiyono, (2017) *proporsional random sampling* merupakan cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi

tersebut sehingga diperoleh 56 responden yang diambil dari 14 kelompok tani yang menanam jagung pipil.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan *Policy Analysis Matrix* (PAM) guna menganalisis daya saing usahatani serta dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usahatani (Pearson, et al., 2005). Dalam menggunakan PAM sebagai alat analisis maka kegiatan ekonomi dapat dipandang melalui dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pada harga privat dan sudut pandang pada harga sosial.

Sudut pandang harga privat menjelaskan semua kegiatan ekonomi yang dilakukan petani berdasarkan harga aktual yang terjadi di lapangan sedangkan sudut pandang harga sosial menjelaskan harga yang terjadi pada kondisi pasar persaingan sempurna dan dalam keadaan keseimbangan sosial yang sama dengan pasar aktual, namun sulit ditemukan pasar dengan kondisi keseimbangan sehingga apabila diasumsikan bahwa perdagangan di pasar internasional bersifat persaingan sempurna maka harga bayangan untuk input dan output yang bersifat tradeable dapat diasumsikan menggunakan *shadow price* (Hidayah, 2018).

Input usahatani dalam analisis PAM dibagi menjadi dua, yaitu *input tradeable* atau input yang diperdagangkan secara internasional dan *input non tradeable* atau input domestik. Penentuan harga sosial untuk input tradeable dapat ditentukan berdasarkan nilai CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) untuk komoditas yang diimpor dan nilai FOB (*Free on Board*) untuk komoditas yang diekspor yang kemudian dikalikan dengan nilai tukar bayangan. Untuk komoditas impor biaya transportasi dan handling di dalam negeri harus ditambahkan pada harga impor ditingkat pelabuhan dan sebaliknya untuk komoditas ekspor biaya transportasi dan handling di dalam negeri harus dikurangkan dari harga ekspor ditingkat pelabuhan. Untuk mencari harga sosial pada *input non tradeable* dapat digunakan menggunakan pendekatan *opportunity cost* (Pearson, et al., 2005).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, alokasi penggunaan input yang bersifat *tradeable* pada usahatani yang dijalankan adalah: benih jagung, pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk NPK, dan pestisida sedangkan alokasi penggunaan input yang bersifat *non tradeable* pada usahatani yang dijalankan adalah: sewa lahan, upah tenaga kerja, dan peralatan usahatani.

Penentuan nilai tukar bayangan atau *Shadow Exchange Rate* (SER) pada analisis PAM diperlukan untuk mendapatkan nilai rupiah bayangan dari output dan *input tradeable* sehingga penghitungan harga sosial dapat diselesaikan. harga bayangan harus berada pada tingkat keseimbangan nilai tukar uang. Keseimbangan terjadi saat pasar uang, semua pembatas dan subsidi terhadap ekspor dan impor dihilangkan (Jakijyah, 2017). Keseimbangan nilai tukar didapat dengan pendekatan *Standard Conversion Factor* (SCF). Adapun langkah yang diperlukan untuk mendapatkan SER adalah:

$$SER^t = \frac{OER^t}{SCF^t} \text{ dimana } SCF^t = \frac{X^t + M^t}{(X^t - TX^t) + (M^t + TM^t)}$$

Dimana:

SER^t = Nilai tukar bayangan tahun ke-t (Rp/USD)

SCF^t = Faktor Konversi Standar tahun ke-t

OER^t = Nilai tukar resmi tahun ke-t (Rp/USD)

X^t = Nilai ekspor Indonesia tahun ke-t (Rp)

M^t = Nilai impor Indonesia tahun ke-t (Rp)

TX^t = Penerimaan pajak ekspor tahun ke-t (Rp)

TM^t = Penerimaan pajak impor tahun ke-t (Rp)

Metode perhitungan menggunakan PAM menggunakan matriks yang terdiri dari tiga baris. Baris pertama menjelaskan nilai-nilai pada harga privat (harga aktual yang terjadi), baris kedua menjelaskan nilai-nilai pada harga sosial (harga pada kondisi pasar persaingan sempurna), dan baris ketiga menjelaskan nilai-nilai divergensi (selisih dari harga privat dikurangi harga sosial) yang dijelaskan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Matriks PAM

	Pendapatan	<i>Input Tradeable</i>	<i>Input Non Tradeable</i>	Keuntungan
Privat	A	B	C	D
Sosial	E	F	G	H
Divergensi	I	J	K	L

Sumber: (Pearson, et al., 2005)

Keterangan:

A : Pendapatan Privat

C : Biaya *Input Non Tradeable* Privat

E : Pendapatan Sosial

G : Biaya *Input Non Tradeable* Sosial

I : Transfer Output

K : Transfer Faktor

B : Biaya *Input Tradeable* Privat

D : Keuntungan Privat

F : Biaya *Input Tradeable* Sosial

H : Keuntungan Sosial

J : Transfer *Input Tradeable*

L : Transfer Bersih

HASIL DAN PEMBAHASAN

Petani responden mayoritas berada pada rentang umur produktif yaitu antara 40-59 tahun dengan mayoritas petani menempuh pendidikan SD. Pengalaman usahatani responden berkisar antara 10-15 tahun dengan luas lahan rata-rata 1,1 hektare. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa responden merupakan petani yang sudah berpengalaman dan matang secara usia sehingga petani dianggap sudah mampu mengambil keputusan terbaik dalam menjalankan usahatannya.

Input yang digunakan dalam menjalankan usahatani jagung pipil meliputi benih jagung, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk SP-36, pestisida, sewa lahan, upah tenaga kerja, dan peralatan pertanian seperti yang disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Penggunaan Input Berdasarkan Harga Privat

Input	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
Benih	14,73	70.000,00	1.031.253,68
Urea	320,73	2.600,00	833.906,45
NPK	332,91	2.300,00	765.694,91
SP-36	144,65	2.600,00	347.161,06
Pestisida	365,48	1.320,38	482.569,79
Upah Tenaga Kerja	39,09	70.000,00	2.736.719,77
Sewa Lahan		398.412,70	398.412,70
Penyusutan Alat			115.576,45

Sumber: (Data Primer, 2021)

Penggunaan pupuk terbesar adalah pupuk NPK yang mencapai 332.91 kg dikarenakan petani berharap mendapatkan hasil pertumbuhan yang maksimal dengan penggunaan pupuk NPK serta didorong oleh komunikasi yang dilakukan ketua gapoktan dan petani unggulan daerah penelitian untuk mampu meningkatkan produksi jagung pipil di Desa Rasau Jaya I. Sedangkan pestisida yang digunakan adalah insektisida bermerek Prevathon dikarenakan petani setempat memiliki kendala dengan hama serangga khususnya hama ulat. Peralatan yang digunakan petani untuk membantu kegiatan usahataniya terdiri dari cangkul, parang, dan *Handsprayer*. Metode penghitungan yang digunakan untuk mengukur penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Tenaga Kerja yang digunakan sebesar 39,09 HOK yang merupakan tenaga kerja luar keluarga. Petani memanfaatkan tenaga kerja luar keluarga dikarenakan mayoritas anggota keluarga petani berada pada usia non produktif dan sebagian ada yang bekerja di sektor non pertanian sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Upah yang dibayarkan adalah upah harian sejumlah Rp. 70.000,00 per 7 jam kerja tanpa pembedaan jenis pekerjaan, umur, dan jenis kelamin. Pemanfaatan lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usahatani seluruh responden merupakan lahan sewaan dengan harga rata-rata per hektar sebesar Rp. 398.412,70.

Output jagung pipil yang dijual petani ke pedagang pengumpul sebesar Rp. 4.000,00 dengan kondisi jagung belum dikupas dikarenakan keterbatasan kelompok tani setempat dalam pengadaan alat pengupas jagung.

Nilai tukar bayangan (SER) merupakan komponen yang penting dalam penghitungan harga sosial. Penentuan SER dapat dilakukan dengan membagi nilai tukar resmi tahun 2020 dengan faktor konversi standar tahun 2020 sehingga didapat hasil nilai SER tahun 2020 adalah Rp. 14.744,77.

Tabel 3. Penghitungan Nilai Tukar Bayangan (SER)

OER	Nilai Tukar Resmi	Rp14.645,12	
Tmt	Penerimaan Pajak Impor	Rp31.833.800.000.000,00	
Txt	Penerimaan Pajak Ekspor	Rp1,653,200,000,000.00	
Mt	Total Nilai Impor	\$141.568.800.000,00	Rp2.073.292.064.256.000,00
Xt	Total Nilai Ekspor	\$161.306.486.102,00	Rp2.362.352.845.742.120,00
SER=OER/SCFt			
SCFT=(Xt+Mt)/(Xt-Txt)+(Mt+Tmt)			
Xt+Mt		Rp4.435.644.909.998.120,00	
Xt-Txt		Rp2.360.699.645.742.120,00	
Mt+Tmt		Rp2.105.125.864.256.000,00	
(Xt-Txt)+(Mt+Tmt)		Rp4.465.825.509.998.120,00	
SCFT			0,99
SER		Rp	14.744,77

Sumber: (Bank Indonesia, 2020),(BPS, 2020a),(BPS, 2020b)

Penentuan harga sosial input usahatani untuk input yang bersifat *tradeable* menggunakan pendekatan nilai tukar bayangan (SER) sedangkan penentuan harga sosial untuk input yang bersifat *non tradeable* untuk penyusutan alat pertanian dianggap sama dikarenakan Indonesia telah mampu memproduksi peralatan pertanian sejenis (Darmayanti et al., 2018). Penentuan

harga sosial sewa lahan dapat ditentukan melalui dua metode, yaitu dengan memakai nilai sewa terbanyak setiap musim maupun dengan penentuan pendapatan tanah untuk alternatif tanaman terbaik (Pearson, et al., 2005). Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan nilai sewa lahan terbanyak. Sedangkan penentuan harga sosial upah tenaga kerja menggunakan nilai upah harian Kabupaten Kubu raya, yaitu sebesar Rp. 81.100,00 per HOK. Adapun informasi harga sosial dijelaskan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Penggunaan Input Berdasarkan Harga Sosial

Input	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
Benih	14,73	40.109,96	590.817,72
Urea	320,73	4.780,49	1.533.247,09
NPK	332,91	6.716,67	2.168.879,91
SP-36	144,65	5.119,62	740.553,23
Pestisida	365,48	1.056,30	386.055,83
Upah Tenaga Kerja	39,09	70.000,00	2.737.000,00
Sewa Lahan		333.333,33	333.333,33
Penyusutan Alat			115.576,45

Sumber: (BPS, 2020a),(BPS, 2020b) Data Diolah

Pendekatan harga sosial pestisida adalah 80% dari harga privatnya, penentuan harga bayangan pestisida mencakup harga-harga bahan baku untuk membuat produk tersebut, namun dikarenakan tingkat konversi bahan baku menjadi pestisida tidak diketahui secara pasti menyebabkan penentuan harga bayangan pestisida didasarkan pada rata-rata harga aktual pestisida di lokasi penelitian dikurangi dengan tarif impor sebesar 10 persen dan PPN sebesar 10 persen sehingga didapat nilai sebesar RP. 386.055,83 (Franiawati et al., 2013). Menurut (Pearson, et al., (2005) penentuan harga bayangan terhadap biaya tenaga kerja yang digunakan diasumsikan sama dengan harga privat.

Penentuan nilai sewa lahan menggunakan pendekatan nilai sewa lahan terbanyak. Sebanyak 12 responden memiliki nilai sewa lahan sebesar Rp. 333.333,33 per hektar sehingga nilai sewa lahan yang dipilih adalah sebesar Rp. 333.333,33 per hektar. Hal ini diasumsikan pasar bekerja saat bersaing sempurna mengingat pasar penyewaan lahan sudah berjalan cukup baik.

Pendekatan harga sosial benih jagung dan pupuk NPK didapat menggunakan pendekatan nilai FOB yang dikonversikan kedalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar bayangan (SER), yaitu sebesar Rp. 14.744,77. Kemudian nilai tersebut dikurangi dengan biaya transportasi dan biaya *handling* sehingga didapat masing-masing harga untuk benih jagung dan pupuk NPK adalah Rp. 40.190,96 dan Rp. 5.607,20. Sedangkan pendekatan harga sosial untuk pupuk urea dan pupuk SP-36 menggunakan pendekatan CIF yang dikonversikan kedalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar bayangan. Kemudian nilai tersebut ditambahkan dengan biaya transportasi dan biaya *handling* sehingga didapat masing-masing harga untuk pupuk urea dan pupuk SP-36 adalah Rp. 4.780,49 dan Rp. 119,62.

Harga sosial output jagung pipil didapat dengan pendekatan CIF yang dikonversikan kedalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar bayangan (SER), yaitu sebesar Rp. 14.744,77. Nilai yang didapat kemudian dikurangi dengan biaya transportasi dan biaya *handling* sehingga didapat harga jagung yang berlaku pada harga sosial jauh lebih tinggi, yaitu sebesar Rp. 7.368,00

Hasil perhitungan PAM didapat setelah nilai-nilai pada harga privat dan harga sosial telah didapatkan sehingga nilai divergensi dapat dihitung. Setelah dapat menemukan divergensi yang

terjadi pada usahatani yang diteliti maka matriks PAM dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat melakukan analisis daya saing serta dampak kebijakan pemerintah. Adapun hasil perhitungan PAM dijelaskan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Analisis PAM Usahatani

	Penerimaan (Rp)	Biaya Input Tradeable (Rp)	Biaya Input Non Tradeable (Rp)	Keuntungan (Rp)
Harga Privat	17.069.914,64	3.460.585,90	3.250.708,92	10.358.619,82
Harga Sosial	31.443.641,02	5.419.555,78	3.185.909,78	22.838.175,45
Divergensi	-14.373.726,38	-1.958.969,88	64.799,14	-12.479.555,63

Sumber: (Data Primer, 2021) Data Diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa kegiatan usahatani yang dilakukan memberikan keuntungan yang positif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keuntungan privat dari usahatani yang dijalankan dengan adanya campur tangan pemerintah mampu memberikan hasil yang positif terhadap kegiatan usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I, yaitu sebesar Rp. 10,358,619.82. Keuntungan sosial pada kegiatan diatas adalah sebesar Rp. 31,443,641.02. Keuntungan sosial yang bernilai positif mengindikasikan bahwa kegiatan usahatani yang dijalankan mampu bertahan tanpa adanya intervensi pemerintah

Menurut Rahmadiyah & Rum, (2020) keunggulan komparatif usahatani merupakan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki suatu wilayah untuk memproduksi dengan pengeluaran yang lebih rendah dari biaya imbang sosial. Keunggulan komparatif usahatani dapat diukur menggunakan indikator *Domestic Resources Cost Ratio* (DRCR). Nilai DRCR usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I dihitung menggunakan nilai yang terdapat pada tabel PAM. Menurut (Diana, 2017) usahatani dikatakan memiliki keunggulan komparatif apabila nilai DRCR dari usahatani tersebut lebih rendah daripada satu atau $DRCR < 1$. Keunggulan komparatif sendiri bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana sumber daya dapat dihemat untuk memberikan satu satuan devisa. Dikarenakan nilai DRCR usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I adalah 0.11 atau $DRCR < 1$ maka dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh tambahan nilai output sebesar Rp. 1.000.000,00 maka usahatani perlu menambahkan biaya input non tradeable sebesar Rp. 110.000,00. Berdasarkan nilai DRCR yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa usahatani telah efisien dalam menggunakan sumber dayanya sehingga memiliki keunggulan komparatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irawati et al., 2015) dimana usahatani yang dijalankan memiliki keunggulan komparatif dengan nilai $DRCR < 1$.

Keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah maupun luar negeri baik berupa barang maupun jasa (Diana, 2017). Pengukuran keunggulan kompetitif usahatani jagung pipil dapat diukur menggunakan indikator *Private Cost Ratio* (PCR) yang nilainya didapat dari tabel PAM. Keunggulan kompetitif menjelaskan kemampuan usahatani untuk membiayai kebutuhan input non tradeable pada harga aktual atau harga yang berlaku di pasar dimana harga tersebut merupakan harga yang sudah mendapat intervensi dari pemerintah. Menurut (Haryanto et al., 2019) usahatani dikatakan memiliki keunggulan kompetitif apabila nilai PCR usahatani tersebut bernilai kurang dari 1. Dikarenakan nilai PCR usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I adalah 0.23 atau $PCR < 1$. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh tambahan nilai output sebesar Rp. 1.000.000,00 maka usahatani perlu menambahkan biaya input non tradeable sebesar Rp. 230.000,00.

Jagung merupakan komoditas pertanian strategis yang ketersediaannya selalu diperhatikan oleh pemerintah. Guna mendukung keberlangsungan usahatani dan ketersediaan jagung dalam negeri pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan terkait komoditas mapupn kebijakan subsidi pupuk. Kebijakan terkait perdagangan internasional serta kebijakan ekonomi makro turut berpengaruh terhadap daya saing komoditas tersebut seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1322/PMK.010/2015 terkait tarif impor sebesar 5% terhadap komoditas jagung dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.011/2014 yang menetapkan tarif impor 5% dan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk impor pupuk mineral atau pupuk kimia yang mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan kalium serta Perbup No. 44 Tahun. 2015 tentang kebutuhan dan harga ceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Kubu Raya. Pengukuran dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah kebijakan yang diterapkan pemerintah mampu mempengaruhi usahatani dan apakah kebijakan yang diterapkan tersebut telah memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan usahatani yang dijalankan. Hasil perhitungan PAM kebijakan pemerintah terhadap usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I dijelaskan pada tabel 6.

Tabel 6. Analisis PAM Dampak Kebijakan Pemerintah

Kebijakan	Indikator	Nilai
<i>Input Tradeable</i>	NPCI	0,64
<i>Input Non Tradeable</i>	TF	Rp 64.799,14
Output	NPCO	0,54
Input-Output	EPC	0,52

Sumber: (Data Primer, 2021) Data Diolah

Berdasarkan tabel 6 nilai *Nominal Protection Coefficient Input* (NPCI) menunjukkan adanya perbedaan harga input tradeable pada harga privat dan harga sosial. Apabila nilai NPCI < 1 maka kebijakan pemerintah terkait input tradeable telah mampu memproteksi petani sebagai konsumen dari input tradeable. Nilai NPCI didapat dengan membagi nilai biaya *input tradeable* pada harga privat yaitu Rp. 3.460.585,90 dengan nilai biaya input tradeable pada harga sosial yaitu Rp. 5.419.555,78. Nilai NPCI dari usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I adalah sebesar 0,64 hal ini berarti petani hanya membayar 64% dari biaya yang seharusnya dibayar apabila tidak ada diterapkan kebijakan pemerintah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Radiansyah et al., 2016) dalam penelitiannya terkait daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani jagung di Kabupaten Bengkayang apabila nilai NPCI < 1 maka dapat disimpulkan bahwa adanya andil pemerintah setempat untuk memproteksi *harga input tradeable* terutama pupuk.

Transfer faktor (TF) menunjukkan selisih antara biaya input non tradeable pada harga privat yaitu Rp. 3.250.708,92 dan biaya input non tradeable pada harga sosial yaitu Rp. 3.185.909,78. Nilai TF dari usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I adalah positif, yaitu sebesar Rp. 64.799,14 hal ini menunjukkan adanya pajak implisit sehingga petani menerima harga input non tradeable yang lebih tinggi daripada harga sosialnya kondisi tersebut dapat terjadi apabila pemerintah tidak menerapkan kebijakan protektif terhadap input non tradeable. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah, 2018) terkait analisis daya saing kopi dan kakao di Provinsi Sulawesi Selatan dimana nilai apabila nilai TF adalah negatif maka dapat disimpulkan terjadinya subsidi implisit namun apabila nilai TF adalah positif maka terjadinya

pajak implisit dalam usahatani sehingga petani harus membayar biaya yang lebih mahal daripada harga sosialnya.

Nominal Protection Coefficient Output (NPCO) menunjukkan rasio perbedaan harga antara harga privat dan harga sosial dengan membagi pendapatan pada harga privat yaitu Rp. 17.069.914,64 dan pendapatan pada harga sosial yaitu Rp. 31.443.641,02. Apabila nilai NPCO > 1 maka harga domestik jagung lebih tinggi daripada harga impor dan kebijakn pemerintah telah mampu memproteksi usahatani, sedangkan nilai NPCO dari usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I adalah sebesar 0.54 atau kurang dari 1. Artinya kebijakan pemerintah belum mampu memproteksi harga jagung pipil domestik sehingga nilai output lebih rendah 54% daripada harga dunia. Penelitian sejenis dilakukan oleh (Diana, 2017) dengan nilai NPCO < 1 hal ini berarti kebijakan harga yang pemerintah terapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor masih belum mampu memproteksi harga output sehingga menyebabkan harga output pada harga privat lebih rendah daripada harga output pada harga sosial.

Indikator yang digunakan untuk mengukur dampak kebijakan pemerintah terhadap input-output adalah dengan menggunakan Effectivity Policy Coeficient (EPC). Nilai EPC didapatkan dengan cara mengurangi pendapatan pada harga privat yaitu Rp. 17.069.914,64 dan biaya input tradeable pada harga privat yaitu Rp. 3.460.585,90 kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi dengan pendapatan pada harga sosial Rp. 31.443.641,02 yang dikurangi dengan biaya input tradeable pada harga sosial Rp. 5.419.555,78. Berdasarkan tabel diatas, nilai dari EPC usahatani adalah kurang dari 1. Apabila nilai EPC > 1 maka kebijakan pemerintah dianggap sudah efektif memproteksi seluruh kegiatan usahatani dan sebaliknya sehingga dikarenakan nilai EPC dari usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I adalah 0.52 atau EPC < 1 maka kebijakan pemerintah belum mampu memproteksi kegiatan usahatani secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa. Secara umum usahatani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I memiliki daya saing baik diukur melalui keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang ditunjukkan dengan nilai DRCCR < 1 dan nilai PCR < 1. Hal ini menunjukkan potensi jagung pipil Desa Rasau Jaya I untuk dapat bersaing dipasar dunia. Kebijakan input yang tertuang dalam Perbup No. 44 Tahun. 2015 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Kubu Raya sudah mampu memproteksi harga input tradeable yang harus dikeluarkan petani yaitu pupuk bersubsidi, pemberlakuan tarif impor jagung sebesar 5% yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor masih belum mampu membuat harga jagung pipil dalam negeri dan luar negeri bersaing, dan secara keseluruhan, kebijakan pemerintah terhadap input-output yang berlaku selama ini masih belum optimal untuk memproteksi petani jagung pipil di Desa Rasau Jaya I. Hal ini berarti pemerintah belum mampu memberikan dampak positif terhadap kegiatan usahatani yang dilakukan hal ini dapat dilihat dari harga privat yang lebih rendah daripada harga sosialnya.

Saran

pemerintah perlu mengkaji kebijakan yang belum mampu memproteksi kegiatan usahatani serta menerapkan kebijakan tambahan yang diharapkan mampu memproteksi usahatani jagung sebagai komoditas pangan dan bahan baku untuk kegiatan industri serta penerapan kebijakan protektif untuk menjaga harga jagung pipil dalam negeri. Guna meningkatkan harga jual komoditas diperlukan peningkatan mutu jagung yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian setempat baik dengan penyuluhan yang tepat terkait standarisasi produk maupun memfasilitasi petani guna menghasilkan output yang berkualitas. Peningkatan mutu produk diharapkan mampu meningkatkan penerimaan petani sehingga petani mampu menjual produk dengan harga yang lebih baik. Petani setempat juga harus mulai menerapkan pertanian yang lebih modern dan bersifat komersial baik dengan metode budidaya terbaru, penggunaan alat dan mesin pertanian yang lebih modern, dan metode penanganan hama yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2020). *Kurs Transaksi Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>
- BPS. (2020a). *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Desember 2020 Impor*.
- BPS. (2020b). *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Harmonized System 2020*.
- Darmayanti, N. W. S., Winandi, R., & Tinaprilia, N. (2018). Analisis Daya Saing Jagung di Wilayah Sentra Produksi di Indonesia dengan Pendekatan Policy Analysis matrix (PAM). *Jurnal Forum Agribisnis*, 8(2), 137–154. <https://doi.org/10.29244/fagb,8,2,137-154>
- Diana, Y. (2017). Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Jagung di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Majalah Ilmiah*, 24(2), 304–317.
- Franiawati, C. I., Zakaria, W. A., & Kalsum, U. (2013). Daya Saing Jagung di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. *JIIA*, 1(4), 291–297.
- Haryanto, L. I., Masyhuri, M., & Irham, I. (2019). Daya Saing Dan Sensitivitas Usahatani Jagung Di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Kawistara*, 8(3), 262. <https://doi.org/10.22146/kawistara.38363>
- Hidayah, H. (2018). *Analisis Daya Saing Komoditi Kakao dan Kopi di Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Irawati, D. J., Sihombing, L., & Ginting, R. (2015). Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Padi Sawah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 4(7).
- Jakiyah, U. (2017). Analisis Daya Saing Beras Organik di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hexagro*, 1(1), 38–42.
- Lestari, S. P., Lestari, D. A. H., & Abidin, Z. (2020). Analisis Daya Saing Usahatani Jagung di Kabupaten Lampung Selatan. *Journal of Food System and Agribusiness*, 4(2), 66–75. <https://doi.org/10.25181/jofsa.V4i2.1606>
- Pearson, S., Carl Gotsch, & Bahri, S. (2005). *Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia* (1st ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Pearson, S., Gotsch, C., & Bahri, S. (2005). *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian*

Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.

- Radiansyah, D., Radian, & Nurliza. (2016). Analisis Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif serta Implikasi Kebijakan Pemerintah pada Komoditas Jagung di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 5(1), 19–27. <https://doi.org/10.21608/aafu.2016.14660>
- Rahmaniyah, F., & Rum, M. (2020). Analisis Daya Saing Jagung Hibrida Unggul Madura Mh-3 Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Agriscience*, 1(2), 367–382. <https://doi.org/10.21107/agriscience.v1i2.8020>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, Yudiono, S., & Suyatno, A. (2015). Analisis Efisiensi Alokatif Faktor-Faktor Produksi Usahatani Jagung Hibrida di Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Rasau Jaya Komplek Kabupaten Kubu Raya. *Social Economic of Agriculture*, 4(2), 10–14. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1008-0813.2015.03.002>